

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

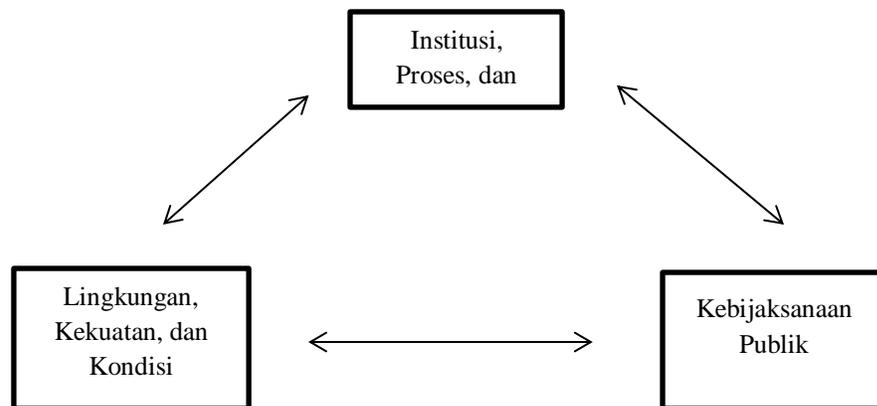
#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Analisis Kebijakan Publik**

Dari perkembangan-perkembangan studi yang hingga sampai sekraang semkain lebih maju menurut yang disampaikan oleh William dalam buku Prof, Said Zaenal Abdin tentang Kebijakan Publik ia mengaitkannya pengertian kebijakan ini dengan sebuah analisis kebijakan dimana dalam perkembangan ilmu sosialnya ini dikaitkan dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu dapatlah sebuah defenisi dari analisis kebijakan ini yang memang digunakan da;am ilmu sosialnya terapan dengan menggunakannya metode agar menghasilkan juga informasi yang terpercaya atau relavan untuk digunakan dalam sebuah perpecahan masalah didalam kehidupan sehari-harinya. Ia juga melihat sebuah ilmu kebijakan ini bisa berkembang lebih lama dari ilmu yang memang sudah ada sejak lama. Multidisplin ini sebagai bagian sifat yang Ia gunakan dalam metodologinya. Ini bisa dikatan berhubungannya dengan kondisi-kondisi masyarakat sekitarnya yang ia terapkan sifat yang kompleks juga tidak akan bisa terpisah antara satu aspek yang ada dengan aspek yang

lainnya.<sup>1</sup> Pada umumnya ini dapat diamati melalui dua variabel, yaitu variabel bebas yang merupakan variabel yang bisa dikatakan bisa mempengaruhi sedangkan variabel terikat merupakan kebalikannya yaitu yang dipengaruhi. Hubungan pengaruh-mempengaruhi ini biasanya bersifat fungsional, baik dalam bentuk hubungan garis lurus (linear), parabola, elips, maupun lingkaran. Namun dalam kajian kebijakan publik, sering dijumpai adanya pengaruh timbal balik diantara variabel-variabel tersebut. Variabel bebas dalam satu posisi menjadi variabel terikat dalam posisi lain, begitu pula sebaliknya.<sup>2</sup> Digambarkan sebagai berikut:

#### Pengaruh Timbal Balik Antarvariabel



Dalam sebuah buku arti kata dari kebijakan adalah tidak pasti dan biasanya digunakan secara longgar oleh mereka yang membuatnya. Definisi kebijakan kadang-kadang dibuat untuk tujuan tertentu. Misalnya,

<sup>1</sup> Prof. Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta:Salemba Humanika,2016) hal.7

<sup>2</sup> Prof. Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta:Salemba Humanika,2016) hal.61-62

buku putih pemerintah tentang Modernisasi Pemerintah pada tahun 1999 mengatakan “pembuat kebijakan adalah proses dimana pemerintah menerjemahkan visi politik mereka ke dalam program dan tindakan untuk memberikan hasil perubahan yang diinginkan di dunia nyata”. maksudnya dalam kebijakan mungkin berhubungan dengan prinsip-prinsip dan prioritas yang pemerintah adopsi sehubungan dengan masalah, dan tidak dengan terjemahannya dalam sebuah tindakan, dan tidak semua kebijakan adalah tentang menghasilkan perubahan.<sup>3</sup>

Dye (1978) menjelaskan bahwa kebijakan publik ini yaitu sub disiplin yang tidak lagi asing dalam pembahasan ilmu politik ini. Terbukti dalam studi awal ilmu politik yang dilakukan oleh para filosof, telah memandang penting fenomena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apa kekuatan-kekuatan yang membentuknya, dan akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Namun studi yang dikatakan masih tradisional ini hanya melakukan analisis yang berdasar pada struktur kelembagaan dan justifikasi aspek legalistik belaka (*institutional and legal-formalism*) terhadap hubungan antara yang memerintah (elit) dan diperintah (massa).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Michael Moran, Martin Rein, dan Robert E Goodin, *Hanbook Kebijakan Publik*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 196

<sup>4</sup> Kusumanegara, Sollahuddin. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava, 2010), hal. 5.

Dalam bukunya Solehuddin Nakkamura dan Ssmalwood menjelaskan tentang kebijakan publik merupakan beberapa rangkaian intruksi dari yang membuat sebuah keputusan diserahkan kepada pelaksananya sebuah kebijakan dan ia menjelaskan tujuan dan juga cara agar tercapainya sebuah tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan menurut Willdovsky, ia menjelaskan kebijakan publik adalah sebuah hipotesis yang didalamnya terdapat kondisi awal dari sebuah aktifitas pemerintah juga akibat-akibatnya yang ada didalam yang bisa ia ramal.<sup>5</sup>

Ruang lingkup dari adanya studi kebijakan publik ini memang sangatlah luas, karena mencakup seluruh berbagai bidang-bidang juga sektor-sektor seperti sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi dan yang lainnya. Dan apabila kita melihat dari hirarkinya ini kebijakan publik bisa bersifat regional, nasional juga lokal seperti halnya peraturan-peraturan pemerintah, keputusan-keputusan setiap pemerintah baik Presiden, Menteri, Kabupaten atau kota, Bupati atau walikota yang ada dan juga undang-undang. Dari berbagai pengertian-pengertian tentang kebijakan publik secara terminologinya ini sangat luas tetapi bagaimana kita memandang dari sudut kita mengerti tersebut.<sup>6</sup> Analisis kebijakan bisa

---

<sup>5</sup> Kusumanegara, Sollahuddin. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Gava,2010), hal.4.

<sup>6</sup> Hamrun, A Luhur Prianto, *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*, Jurnal Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer

diartikan sebagai aktifitas intelektual juga praktis yang dengan tujuan untuk menciptakannya sesuatu, dengan cara adanya kritis untuk menilai, dan memberikan komunikasi tentang pengetahuan yang didalamnya terdapat proses kebijakannya.<sup>7</sup>

## **2. Proses Analisis Kebijakan**

Proses analisis kebijakan merupakan rangkaian suatu aktifitas yang intelektual dilakukan dengan cara adanya sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat proses juga didasari dengan yang bersifat politisi. Dengan adanya analisis kebijakan ini dilakukan agar dapat menciptakan, dilakukan dengan cara kritis dengan menilai dan adanya terjalin komunikasi suatu pengetahuan yang memang relevan dengan terdapat suatu kebijakan dalam satu wadah ataupun lebih dengan tahapan-tahapan dari proses pembuatan kebijakan tersebut.<sup>8</sup>

### **a. Merumuskan Masalah**

Masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Willian N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,1998), hal. 44.

<sup>8</sup> Willian N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,1998), hal. 23.

- Terdapat saling ketergantungan antara masalah kebijakan
- Mempunyai subjektivitas
- Buatan manusia karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia
- Bersifat dinamis

Fase-fase perumusan masalah kebijakan disusun sebagai berikut:

- Pencarian masalah
- Pendefinisian masalah
- Spesifikasi masalah
- Pengenalan masalah

Model-model kebijakan sebagai berikut:

- Model deskriptif, yang bertujuan menjelaskan dan atau memprediksi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi pilihan-pilihan kebijakan
- Model normatif, yang selain bertujuan sama dengan model deskriptif juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian nilai atau kemanfaatan.

Kedua model diatas, dapat disampaikan dengan verbal yaitu yang disampaikan dengan bahasa sehari-hari, model simbolis yaitu dengan

mempertgunakan simbol-simbol matematis, dan model prosedural yaitu menampilkan hubungan dinamis dan variabel kebijakan.

#### b. Peramalan Masa Depan Kebijakan

Peramalan atau *forecasting* adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Tiga bentuk peramalan, sebagai berikut:

- Peramalan ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan atas ekstrapolasi hari ini ke masa depan, dan produknya disebut proyeksi. Teknik yang dapat digunakan antara lain analisis antar waktu, estimasi tren linear, pembobotan eksponensial, transformasi data, katastrofi metodologi.
- Peramalan teoritis, yaitu ramalan yang didasarkan pada suatu teori, dan produknya disebut prediksi. Teknik yang dapat digunakan antara lain pemetaan teori, model kasual, analisis regresi, estimasi titik dan interval dan analisis korelasi.
- Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang didasarkan pada penilaian para ahli atau pakar dan produknya disebut perkiraan.

### c. Rekomendasi Kebijakan

Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi.

### d. Pemantauan Hasil Kebijakan

Pemantauan atau *monitoring* merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan, setidaknya menggunakan empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu *eksplanasi*, *akuntansi*, *pemeriksaan* dan *kepatuhan (compliance)*.

Hasil kebijakan dibedakan antara keluar (*output*), yaitu produk layanan yang diterima kelompok sasaran kebijakan, dan dampak (*impacts*), yaitu perubahan perilaku yang nyata pada kelompok sasaran kebijakan.

Dunn membedakan jenis tindakan kebijakan menjadi dua, yaitu *kebijakan regulatif*, yaitu tindakan kebijakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu dan *kebijakan alokatif*, yaitu tindakan mengalokasikan sumber daya tertentu pada sasaran kebijakan. Baik kebijakan regulatif maupun

alokatif dapat memberikan akibat yang bersifat distributif ataupun redistributif.

e. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Jika pemantauan menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan.

### **3. Implementasi Kebijakan**

Dari bukunya Agustino, Mazmaniann dan Sabatierr medefiniskan tentang implementasi kebijakan adalah suatu pelaksana keputusan kebijakan yang dikatasakn dasar yang dibentuk dalam suatu undng-undang, tetapi juga bisa berbentuk tentang keputusan-keputusan dan perintah pemerintah eksekutif yang katakan penting atau keputusan yang dibuat oleh badan peradilan. Dari keputusan tersebut terdapat terindikasi masalah-masalah yang mereka ingin tuntaskan, dan ia menyebut dengan tegas bahwa tujuan dan sasaran yang mereka inginkan atau ingin dicapai, dan berbagainya cara dalam menstrukturkan dari mengatur sebuah proses implementasi tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>, “Tinjauan Pustaka”, Digital Repository Unila, 2014.  
<http://digilib.unila.ac.id/9618/18/BAB%20II.pdf> (akses 19 Februari 2020)

Implementasi kebijakan ini merupakan tahapan yang penting dari suatu kebijakan. Karena pada tahapan ini sebagai penentu apakah sebuah kebijakan yang mereka tempuh oleh pemerintah benar aplikabel di lapangan juga berhasil dalam menghasilkannya *output* dan *outcomes* yang memang yang telah direncanakan sebelumnya. *Output* merupakan kebijakan yang telah dikeluarkan diharapkan bisa munculnya sebagai dari keluaran langsung dari kebijakan itu sendiri. Sedangkan *outcomes* ini merupakan sebuah ukuran setelah dikeluarkannya *output* atau bisa dikatakan dikaitkan dengan waktu yang memang lama pasca implementasi kebijakan tersebut.<sup>10</sup> Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Meter dan Horn sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

---

<sup>10</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Yogyakarta:Gava Media 2009) hal 143

- b. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal.
- c. Sumber daya menunjukkan kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial ataupun manusia) untuk mengasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
- d. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjukkan kepada mekanisme prosedur yang dirancang untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan.
- e. Karakteristik badan pelaksana, menunjukkan seberapa besar daya dukungan struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjukkan bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
- g. Sikap pelaksana, menunjukkan bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran

dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjukkan sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.<sup>11</sup>

#### **4. Evaluasi Kebijakan**

Dalam evaluasi kebijakan ini maksudnya kebijakan-kebijakan atau semua kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah apakah dalam kebijakannya tersebut sudah sesuai dengan pedoman yang dilaksanakannya dan juga dalam sasaran apakah sudah mencapai tujuannya dan itu semua harus adanya sebuah evaluasi kebijakan ini. Oleh karena itu dengan adanya hal tersebut evaluasi kebijakan ini bisa mengetahui apa saja kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dan juga hasilnya apa yang memang sudah tercapai. Dari definisi yang dikeluarkan oleh William Dun ini yaitu sebuah prosedur analisis kebijakan yang memang dalam kegunaannya ini untuk menghasilkan adanya aksi-aksi dimasa yang lalu atau masa berikutnya.<sup>12</sup>

Didalam buku Nugroho ada penjelasan tentang evaluasi implementasi yang dikemukakan oleh James P. Lester dan Joseph H. Steward Jr pada tahun 2000 menurutnya evaluasi implementasi kebijakan ini terdapat berbagai sub-sub yang menjadi beberapa kelompok yaitu evaluasi proses yang

---

<sup>11</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Yogyakarta:Gava Media 2009) hal 38

<sup>12</sup> Narendra Titis Hardjanti, *Evaluasi Implementasi Kebijakan (Analisis Mengenai Proses Implementasi Dan Dampak Jangka Pendek Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Akta Kelahiran Di Kota Surakarta)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret

memang berhubungan dengan prose implementasi dalam kebijakan, ada juga evaluasi *impact* merupakan suatu evaluasi yang berhubungan dengan hasil dari implementasi kebijakan yang telah dibuat, dan dapat didefinisikan bahwa evaluasi kebijakan ini merupakan pembenaran dari hasil yang hendak akan dicapai yang dalam tujuannya ini mencerminkan tujuan yang dikehendaki dan ada juga evaluasi meta-evaluasi yang berhubungan dengan evaluasi dari beberapa implementasi kebijakan yang telah ada agar menemukan kesamaan tertentu sesuai dengan hasil yang ada.<sup>13</sup>

Dalam bukunya Nurcholis (2007:277) ia mengemukakan evaluasi kebijakan merupakan penilaian secara keseluruhan terhadap 3 aspek yaitu *input*, *proses*, *output*, dan *outcome* dari adanya sebuah kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya evaluasi membutuhkan sebuah skema umum penilaian, yaitu:

1. *Input*, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, meliputi sumberdaya manusia, sarana atau prasarana, sosialisasi kebijakan.
2. *Proses*, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang meliputi kejelasan,

---

<sup>13</sup> Nugroho, Riant. *public policy*. PT Elex Komputindo. Jakarta. 2012. hal 706

mekanisme, kepastian, penertiban dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan

3. *Output* (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Output meliputi tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang tertangani dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
4. *Outcome* (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat didalamnya.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Ripley yang dikutip oleh Herabudin dalam bukunya, evaluasi implementasi secara khusus melakukan evaluasi terhadap proses. Menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada perspektif apa yang terjadi dan perspektif kepatuhan serta ditujukan untuk melakukan evaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang terjadi dalam jangka pendek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi implementasi mempunyai beberapa kegunaan:

---

<sup>14</sup> Nurcholis, Hanif. *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Gramedia. Jakarta. 2007. halaman 277

1. Menggambarkan realitas yang muncul dengan pola-pola sejauh dapat dilakukan.
2. Menjelaskan pola-pola yang ada termasuk berbagai pengaruh yang ada, arah dan hubungan sebab akibat dari berbagai pengaruh tersebut.
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek proses implementasi pada fase awal program dilaksanakan; bagaimana pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan; bagaimana cara menghadapi perbedaan dari berbagai harapan dan tujuan.<sup>15</sup>

Sedangkan fungsi dari evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (agustino, 2009:188), yaitu:

1. Memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan program dan kegiatan, yaitu mengenal seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu.
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kiritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

---

<sup>15</sup> Herabudin. *Studi kebijakan pemerintahan dari filosofi ke implementasi*. Pustaka setia. Bandung. 2016. hal 164.

3. Memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif yang lain.<sup>16</sup>

### **5. Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Pertama-tama yang dimaksud dengan ruang terbuka yaitu ruang yang memang diluar atau terbuka untuk umum yang dalam pemanfaatnya ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat dengan secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam kurun waktu yang memang ditentukan ataupun tidak ditentukan. Dalam bentuknya ruang terbuka ini yaitu seperti taman-taman kota, jalan trotoar dan yang lainnya, dalam ruang terbuka ini bisa kita lihat apabila dari sifatnya ini dibedakan menjadi tiga yaitu yang pertama ruang terbuka privat adalah ruang publik yang dimiliki oleh pribadi dan juga terdapat batasan waktu tertentu dalam mengaksesnya, kedua ruang terbuka semi privat yaitu ruang publik yang memang bisa diakses oleh seluruh masyarakat atau umum tetapi bersifat berkepemilikan pribadi, dan yang ketiga ruang terbuka umum yaitu ruang publik yang

---

<sup>16</sup> Agustino, Leo. *dasar-dasar kebijakan publik*. AIPI. Bandung. 2009. hal 188

dimiliki oleh pemerintah dan bisa diakses oleh masyarakat umum secara bebas tanpa adanya batasan waktu yang ditentukan.<sup>17</sup>

Ruang terbuka Hijau atau yang disingkat dengan RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara ilmiah maupun yang sengaja ditanam. Pengelolaan RTH ini adalah upaya sistematis, mencegah terjadinya pencemaran udara dikawasan lingkungan RTH dan terjadinya pencegahan kerusakan terhadap RTH tersebut seperti adanya rencana awal, pemantauan atau pengawasan, pemeliharaan, penegakan hukum dan juga yang lainnya yang dilakukannya secara terpadu untuk melestarikan fungsi dari Ruang Terbuka Hijau.<sup>18</sup>

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka lainnya yang berupa kawasan tanpa bangunan diantara kawasan terbangun. Ruang terbuka berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Dari daerah terbangun dengan kegiatan industri akan menimbulkan emisi gas buang dan konsentrasi manusia pada suatu tempat yang melampaui daya dukung lingkungan menimbulkan polusi udara yang berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Dampak tersebut antara

---

<sup>17</sup> Rustam Hakim, “Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau”, Rustam2000, 4 Juli 2013. <https://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/> (akses 26 januari 2020)

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Bab 1 Pasal 1

lain gangguan pernafasan, pencetus kanker paru-paru, penurunan kecerdasan anak, dan penyakit jantung. Peranan ruang terbuka hijau menyediakan udara bebas untuk mengatasi dampak tersebut yang tidak hanya diperlukan dikawasan perkotaan saja, tetapi juga bagi pemukiman perdesaan yang padat. Fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Pencipta lingkungan udara sehat, antara lain berfungsi sebagai ventilasi kota dan menurunkan polutan di udara.
- b. Penyedia ruang untuk kenyamanan hidup (amenity), seperti tempat untuk rileks, interaksi sosial dan olahraga.
- c. Pendukung estetika lingkungan.<sup>19</sup>

## **6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Didalam bukunya Hakiim (2008) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan kota ini bisa diartikan sebagai kumpulan-kumpulan kegiatan yang dibuat bersamaan agar bisa membentuk dan juga mengembangkan ekonominya yang ada dikota tetentu juga mengarahkannya kepada bidang sosial ataupun fisik. Adanya pengelolaan ruang terbuka hijau ini akan memberikan pengaruh yang banyak pada perubahannya kualitas dan juga kuantitasnya, seperti yang telah diungkapkan dalam sebuah penelitian oleh Hallee yang dalam penelitian tersebut memang tidak akan mudah

---

<sup>19</sup> Randi Ruslan. *Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar 2017. Hal 25-26

dalam memperbaiki strateginya kelembagaan perkotaannya ini dan juga akan mempunyai *output* yang sudah terukur. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau ini terdapat beberapa aspek-aspek seperti kelembagaan, perencanaan, sumber daya manusia (SDM), koordinasi dan pendanaan yang diberikan.<sup>20</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun dari berbagai penelitian sebelumnya yang dianggap relevan oleh peneliti yang membahas tentang kebijakan Ruang Terbuka Hijau yaitu sebagai berikut.

Pertama Randi Ruslan program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin 2017, mengenai tentang Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan kota di Kabupaten Majene. Pembahasannya ini membahas sebuah proses dalam pelaksanaannya tata kelola RTH terhadap pembangunan-pembangunan di kota tersebut dan apa yang menjadikan sebuah peran bagi pemerintah terhadap adanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Majene ini.

Kemudian Narendra Titis H program studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009, mengenai tentang Evaluasi Implementasi Kebijakan (Analisis Mengenai

---

<sup>20</sup> Hamrun dan A. Luhur Pranto. *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*. Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIKOM. Hal 9

Proses Implementasi dan Dampak Jangka Pendek Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Akta Kelahiran di Kota Surakarta.

Dan yang ketiga yaitu Muhammad Fahril M program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hassanudin Makassar, mengenai tentang Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau.

**Tabel 2.1**

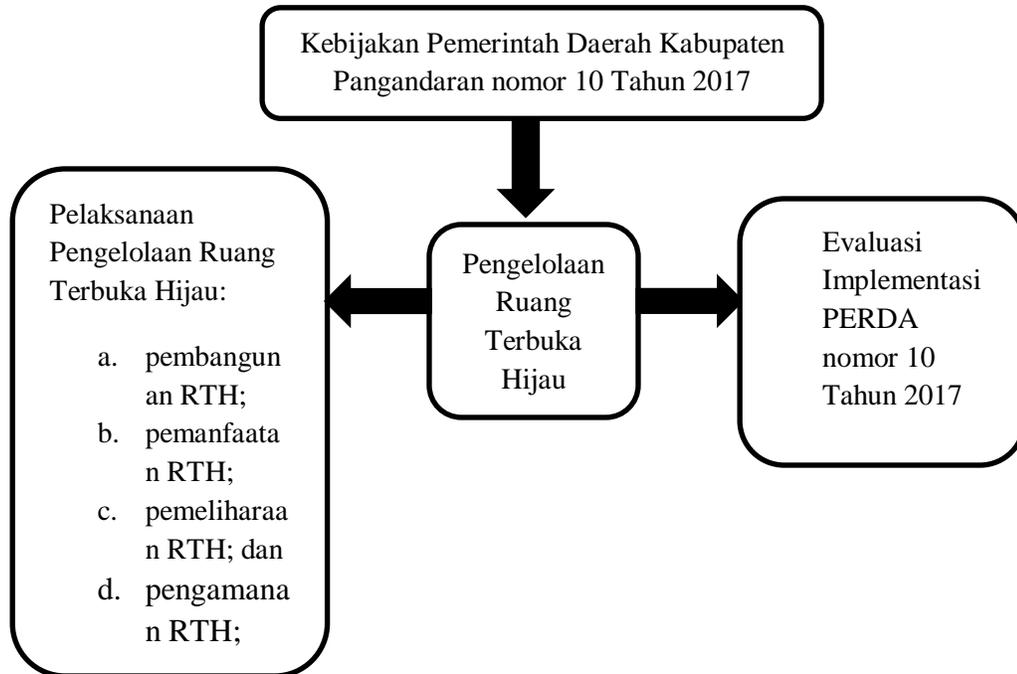
**Perbandingan Pemikiran Mengenai Ruang Terbuka Hijau**

PENELITI	Randi Ruslan (S1)	Narendra Titis H (S1)	Muhammad Fahril M (S1)
JUDUL PENELITIAN	Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene	Evaluasi Implementasi Kebijakan (Analisis Mengenai Proses Implementasi Dan Dampak Jangka Pendek Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Akta Kelahiran Di Kota Surakarta)”	Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Baubau
TUJUAN PENELITIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau dalam pembangunan kota di Kabupaten Majene</li> <li>2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembebasan Biaya Akta Lahir di Kota Surakarta</li> <li>2. Untuk mengetahui dampak jangka pendek kebijakan pembebasan biaya akta lahir dalam rangka meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran.</li> <li>3. Untuk mengetahui kendala yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Baubau.</li> <li>2. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Baubau.</li> </ol>

	<p>kawasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Majene</p> <p>3. Untuk memberikan pemahaman bahwa ruang terbuka hijau penting untuk kawasan perkotaan terkait pemenuhan 30% ruang terbuka hijau kawasan perkotaan</p> <p>4. Menghasilkan rancangan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Majene</p> <p>5. Menghasilkan regulasi yang lebih khusus di daerah atau wilayah yang diteliti mengenai ruang terbuka hijau.</p>	<p>dihadapi dalam mencapai efektivitas kebijakan</p>	
<b>METODE PENELITIAN</b>	<p>Penelitian yang digunakan yaitu penelitian analisis deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang ruang terbuka hijau yang difokuskan pada pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Majene. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara analisi</p>	<p>Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Dalam validitas data menggunakan teknik triangulasi data.</p>	<p>Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumen dan arsip.</p>

	data, wawancara, observasi lapangan		
HASIL PENELITIAN	<p>Dalam pembangunan sebagai manifestasi dari fungsi dan manfaat RTH di perkotaan, maka rencana penyediaan RTH ini diharapkan mampu memlihkan ekosistem di perkotaan yang telah lama rusak ini. Dengan cara melihat perkembangan kota Majene ini, maka jenis RTH yang dapat di rencanakan yaitu RTH perkarangan, RTH taman dan hutan kota serta RTH jalur hijau jalanan. Dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau ini disesuaikan dengan konsep rencana pengembangan.</p>	<p>Secara garis besar kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembebasan biaya penerbitan akta kelahiran telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaik.</p>	<p>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau dapat dilihat dari program –program pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Sebelumnya yakni Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016 melalui pembangunan taman –taman kota yang saat ini telah menjadi pusatrefreshing, bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Baubau. Dan dilanjutkan dengan program –program Dinas Perumahan dan Pemukiman yang telah mengambil tugas dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau dengan pembuatan program –program kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan taman –taman kota.</p>

### C. Kerangka Pemikiran



Dalam sebuah perencanaan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan usaha-usaha dalam memperbaiki lingkungan, akan tetapi perlu dibangunnya integrasi ruang hijau agar kota disetiap sudutnya bisa menghirup udara hijau. Adanya sebuah kekhawatiran mengenai kualitas lingkungan telah mendorong meningkatnya perhatian terhadap Ruang Terbuka Hijau mulai dari pohon tunggal hingga berupa taman. Dalam Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 30% dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Teknis lebih lanjut tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 5 tahun 2008. Lalu dikeluarkan

PERDA setiap daerah tentang RTH dan khususnya di Pangandaran ini yaitu

PERDA nomor 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.